

Kode/Rumpun Ilmu: 597/Ilmu Pemerintahan

USULAN

HIBAH PENELITIAN KEMITRAAN



**POLA PEMBIAYAAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMENANGAN PEMILUKADA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

PENGUSUL

Sakir, S.IP., M.IP/NIDN: 0506118902

Anwar Kholid, S.IP., M.IP/NIDN: 0505028604

Anugrah Esa Oktoricho Al-Amin/NIM: 20150520037

Muhammad Taufiq Fatchurrahman Bengkulah/NIM: 20150520214

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DESEMBER 2018**

Judul Penelitian

POLA PEMBIAYAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Uraian Penelitian

Tahun Usulan	2018
Tahun Pelaksanaan	2019
Durasi Kegiatan	1 Tahun
Usulan Tahun ke-	1
Rumpun Ilmu/Sub Rumpun Ilmu	Ilmu Pemerintahan
Jumlah Tim	4 Orang
Usulan dana	Rp. 15.000.000,-
Luaran Wajib	1) Jurnal Nasional ber-ISSN/Terakreditasi <i>a) Jurnal Politik, Universitas Indonesia</i> <i>b) Jurnal ARISTO, Univ. Muhammadiyah Ponorogo</i> 2) Prosiding Seminar Nasional/Internasional <i>ICONPO 2019, Agustus 2019 di KKU, Thailand</i>
Luaran Tambahan	Skripsi Mahasiswa

**HALAMAN PENGESAHAN
HIBAH PENELITIAN KEMITRAAN**

Judul Penelitian : Pola Pembiayaan Partai Politik Dalam Pemenangan
Pemilukada di Jawa Tengah Tahun 2018

Kode/Rumpun Ilmu : 597 /Ilmu Pemerintahan

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Sakir, S.IP., M.IP
b. NIDN/NIK : 0506118902
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 081392529488
f. Alamat email : mas.sakir@fisipol.umy.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Anwar Kholid, S.IP., M.IP
b. NIDN/NIK : 0505028604
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. Alamat email : anwar.kholid@fisipol.umy.ac.id

Anggota Peneliti Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Anugrah Esa Oktoricho Al-Amin
b. NIM : 20150520037
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Muhammad Taufiq Fatchurrahman Bengkulah
b. NIM : 20150520214
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke UMY : Rp. 15.000.000,00
- dana internal Prodi : Rp. 0
- dana institusi lain : Rp. 0
- *inkind* sebutkan : Rp. 0

Yogyakarta, 6 Desember 2018

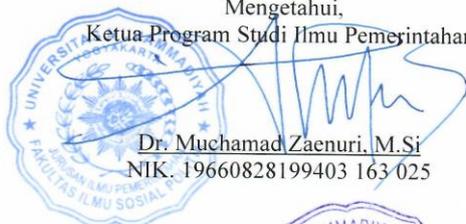
Ketua Peneliti,



Sakir, S.IP., M.IP

NIK. 19891106201604 163 156

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK. 19660828199403 163 025

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Husni Amriyanto Putra, M.Si

NIK. 19690301199406 163 026

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilu di Jawa Tengah tahun 2018. Dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai sumber pembiayaan partai politik, bentuk dan pola penggunaan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Biaya politik yang mahal telah memunculkan isu mengenai beratnya beban partai politik (Parpol) dalam menjalankan perannya sebagai instrumen demokrasi. Beberapa kegiatan politik, termasuk kampanye, membutuhkan biaya yang mahal. Selain mekanisme penggunaan biaya kampanye politik, terdapat juga persoalan lain yang terkait dengan kelemahan pengaturan dana kampanye yang bersumber dari partai politik itu sendiri. Praktik pembiayaan partai menjadi persoalan utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara (Hopkin dalam Faisal et al., 2018). Timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pembiayaan partai. Data statistik yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Lalu, pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat 76 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka dan terdakwa KPK.

Tindak pidana korupsi seperti ini terus terjadi karena politik uang dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa (Mahfud, 2003: 228). Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pernah menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 sebanyak 290 Kepala Daerah terlibat kasus hukum, yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi (Faisal, Bariroh, & Mulyanto, 2018). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan menganalisis pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha pembuatan model akuntabilitas pembiayaan partai politik. Penelitian ini akan dilakukan dengan skema penelitian kemitraan dengan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY untuk dijadikan sebagai topik penelitian skripsinya. Target luaran dari penelitian ini adalah publikasi di Jurnal Nasional ber-ISSN/Terakreditasi, Prosiding Seminar Nasional/Internasional, dan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa.

Kata Kunci: *Pola Pembiayaan, Partai Politik, Pemilu.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilu di Jawa Tengah tahun 2018. Dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai sumber pembiayaan partai politik, bentuk dan pola penggunaan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas pembiayaan partai politik dalam Pemilu.

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, biaya politik semakin mahal. Mahalnya biaya politik tersebut juga menjadi beban bagi partai politik dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik akhirnya dipaksa untuk mencari alternatif dalam pola pembiayaan untuk kegiatan kepartaian dan pemenangan dalam Pemilu. Salah satu contoh beban biaya yang ditanggung partai politik adalah biaya saksi yang jumlahnya sangat besar disesuaikan dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di setiap daerah pemilihan.

Pada Pemilu Jawa Tengah tahun 2018, ada 138.224 saksi yang bertugas di 63.973 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS ada dua saksi yang dikoordinatori oleh satu koordinator desa (Kordes) dengan jumlah keseluruhan Kordes di Jateng sebanyak 8.559 orang. Angka itu masih ditambah tiga saksi di setiap PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Jawa Tengah memiliki 573 Kecamatan, kebutuhan saksi untuk memenuhi seluruh PPK berjumlah 1.719 orang, hasil ini dipaparkan langsung oleh Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dari angka tersebut, setidaknya butuh Rp 15 miliar untuk honor seluruh saksi dan Kordes. Padahal dalam realitas lapangan biaya politik tidak hanya digunakan sebagai pembiayaan saksi saja, namun juga untuk membiayai kegiatan lain seperti kampanye, tim sukses, dan lainnya (Radar Semarang, 29 Mei 2018).

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmajati, dkk (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan politik di Kabupaten dan Kota Madiun sebagian besar bersumber dari calon kepala daerah dengan komponen pengeluaran terbesar untuk biaya kandidasi dan pembelian suara. Selain itu, pengelolaan pembiayaan politik dibagi ke dalam dua jenis yaitu pengelolaan formal dan non-formal. Pengelolaan pembiayaan politik non-formal ini yang jumlahnya sangat besar. Untuk kasus di Kota Madiun biaya politik yang dikeluarkan setiap pasangan calon kepala daerah yaitu Paslon 1 sebesar Rp 12-15 miliar, Paslon 2 sebesar Rp 7-8 miliar, dan Paslon 3 sebesar Rp 10 miliar. Selanjutnya kasus di Kabupaten Madiun biaya

politik yang dikeluarkan setiap paslon adalah Paslon 1 sebesar Rp 12-15 miliar, Paslon 2 sebesar Rp 12-15 miliar, dan Paslon 3 sebesar Rp 7-10 miliar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU tidak menggambarkan sepenuhnya realitas pembiayaan politik dalam Pemilukada dan sistem audit dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel.

Mahalnya biaya politik dalam Pemilukada, memaksa pemenang Pemilu untuk mencari solusi supaya biaya dapat kembali “balik modal” sehingga membuat banyak pemenang Pemilu melakukan tindak pidana korupsi. Data statistik KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Sementara itu pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat 76 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka dan terdakwa KPK. Tindak pidana korupsi ini terus terjadi karena politik uang sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa (Mahfud, 2003: 228). Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pernah menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 sebanyak 290 Kepala Daerah terlibat kasus hukum yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi (Faisal, Bariroh, & Mulyanto, 2018).

Sesuai dengan data kasus tindak pidana korupsi di atas, Mietzner (dalam Faisal et al., 2018) menyatakan bahwa meskipun pelaku korupsi berisiko ditangkap dan dipenjara tetapi banyak pelaku tetap memandang bahwa korupsi lebih menguntungkan. Oleh sebab itu partai politik mencari calon penyumbang dana dari banyak pihak diluar partai seperti perseorangan, badan hukum bahkan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki kesamaan tujuan. Proses aliran sumbangan dana inilah yang sarat permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pelaporannya kepada seluruh pihak yang terkait. Reza Syawawi menjelaskan bahwa anomali dana politik di Indonesia sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya kasus korupsi. Anomali pertama yaitu pendanaan politik yang tidak memiliki relasi yang sehat antara anggota dan institusi Parpol. Praktik sumir memungkinkan Parpol bebas menentukan limit sumbangan dana sehingga menjadi pintu masuk pelanggaran tindak pidana korupsi. Selanjutnya, relasi korporasi dengan anggota Parpol yang berbasis dana sumbangan ini erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan anggota Parpol oleh korporasi (Kompas, 26 November 2018).

Menurut Dwipayana (2013), pembiayaan gotong royong semakin menguat sejalan dengan semakin menguatnya *grassroots protest movement* yang berlangsung dalam kurun waktu 1996 sampai tahun 1999. Hal senada juga disebutkan oleh Fuad, (2014), “*The people at grassroot level have their own logic in terms of their political rationality*”. Pembiayaan

gotong royong memiliki ciri sebagai berikut: pertama, sumber pembiayaan utama berasal dari kontribusi para pendukung secara swadaya. Kedua, pengeluaran partai di konversi menjadi kerja-kerja politik yang dilakukan secara *partisanship*, yaitu pendukung partai bekerja secara sukarela baik dalam pengorganisasian partai maupun dalam kampanye Pemilu. Ketiga, pengelolaan dana lebih banyak dilakukan secara desentralistik dan swakelola sehingga muncul model subsistem atau bahkan swasembada yang mengharuskan setiap cabang partai bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri secara swadana dan swakelola.

Anomali pembiayaan gotong royong tidak hanya dipengaruhi faktor tunggal, melainkan melibatkan berbagai faktor mulai dari perubahan lingkungan strategis (faktor eksogen), Hal ini terjadi ketika *grassroots protest movement* semakin membesar dan melahirkan sentimen kegotongroyongan dan *partisanship* di tingkat bawah dan pada saat yang bersamaan berlangsung pergeseran dalam relasi kekuasaan di internal partai (faktor endogen), dimana ditingkat kepemimpinan pusat mengalami keterputusan akses pada sumber dana negara.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui pola pembiayaan partai politik dalam kemenangan Pemilu di Jawa Tengah tahun 2018 sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan model akuntabilitas pembiayaan partai. Penelitian ini akan dilakukan dengan skema penelitian kemitraan dengan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY untuk dijadikan sebagai topik penelitian skripsinya. Penelitian ini akan mencoba menjawab rumusan masalah berikut ini:

- 1) Bagaimana pola pembiayaan partai politik dalam kemenangan Pemilu di Jawa Tengah tahun 2018?
- 2) Bagaimana model akuntabilitas pembiayaan partai politik dalam kemenangan Pemilu di Jawa Tengah tahun 2018?

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pembiayaan Partai Politik

Ada beberapa variasi dan konsep dasar pola pembiayaan partai yang dipakai di sejumlah negara. Schroder (2000) menyatakan bahwa pada prinsipnya terbuka kemungkinan-kemungkinan legal dalam pembiayaan partai. Schroder merangkum sejumlah variasi dan konsep dasar pola pembiayaan partai tersebut, yaitu:

a) Iuran Anggota

Partai menarik iuran dari para anggotanya. Iuran anggota biasanya dibayar secara berkala oleh anggota partai. Besar iuran bergantung pada besar penghasilan tiap anggota. Pada dasarnya, landasan hukum penarikan iuran anggota adalah Anggaran Dasar Partai. Dalam Anggaran Dasar haruslah diuraikan bagaimana iuran-iuran anggota didistribusikan kepada organ-organ partai pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Secara umum, tiap partai harus menarik iuran dari semua anggotanya. Seluruh anggota partai harus membayar iuran agar ada keharmonisan dalam partai politik. Jika partai politik hanya bergantung pada sumbangan segelintir anggota atau malah kadang-kadang hanya satu atau dua anggota maka partai berpotensi diarahkan kepada kepentingan segelintir, satu, atau dua anggota saja. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan partai karena partai akan menghadapi tekanan terus-menerus dari dalam, maupun luar partai.

b) Biaya Penerimaan Anggota Baru

Menurut penelitian Schroeder ada sejumlah partai yang menerapkan biaya penerimaan bagi anggota baru. Walaupun besar iuran penerimaan bagi anggota baru ini relatif kecil, namun setidaknya partai dapat menambah kasnya. Namun di Indonesia penarikan biaya dari anggota baru sangatlah jarang terjadi khususnya penarikan dana yang digunakan untuk pembiayaan kontestasi pemilihan umum (Pemilu).

c) Sumbangan

Jangkauan sumbangan bagi partai telah diatur dalam undang-undang kepartaian, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumbangan untuk partai dapat berasal dari perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar). Dalam undang-undang kepartaian tersebut juga diatur larangan-larangan terhadap sumber dan besar sumbangan.

Larangan-larangan itu adalah larangan penerimaan sumbangan dari luar negeri, larangan menerima sumbangan dari perusahaan publik, larangan menerima sumbangan melebihi besaran wajib dan kewajiban mengumumkan sumbangan, dan larangan mengaitkan sumbangan dengan layanan tertentu. Namun demikian, Arief (2004) mengungkapkan kemungkinan kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan karena kelemahan undang-undang dalam mengantisipasi kemungkinan korporasi memberikan sumbangan yang melampaui jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang.

d) Penerimaan Pemberian Berbentuk Barang.

Sumbangan atau pemberian berupa barang menurut Schroeder dalam bukunya adalah satu cara untuk menghindari aturan-aturan tentang sumbangan uang. Sumbangan barang dapat berupa kertas, mobil, printer, jasa cetak, termasuk menyediakan waktu siar untuk iklan radio dan televisi, atau ruang iklan di surat kabar. Semua biaya penyediaan barang atau jasa tadi ditanggung oleh perusahaan penyumbang. Biaya pajaknya pun menjadi tanggung jawab perusahaan penyumbang yang dicatat sebagai pengeluaran operasional perusahaan. Oleh karena itu, Fitriyah (2011) menyatakan ketika kemampuan dana calon menjadi pertimbangan maka terbuka ruang bagi masuknya sumber-sumber dana dari pihak luar termasuk kemungkinan masuknya dana ilegal.

Perusahaan pun bisa menyumbang dalam bentuk tenaga personalia seperti supir, tenaga ahli, pegawai administrasi, sekretaris, dan sebagainya (yang ditugaskan bekerja di kantor pengurus pusat atau cabang partai untuk jangka waktu tertentu). Bahkan, untuk kamufase, pegawai tersebut tetap bekerja di kantor perusahaan dan dari sana mereka bertugas untuk keperluan partai. Disembunyikannya sumbangan atau pemberian berbentuk barang atau jasa muncul ketika ada pembatasan besar sumbangan dari perorangan atau organisasi. Di sini jelas terlihat bahwa upaya membatasi besar sumbangan oleh perorangan atau perusahaan kepada partai melalui peraturan-peraturan terbukti gagal.

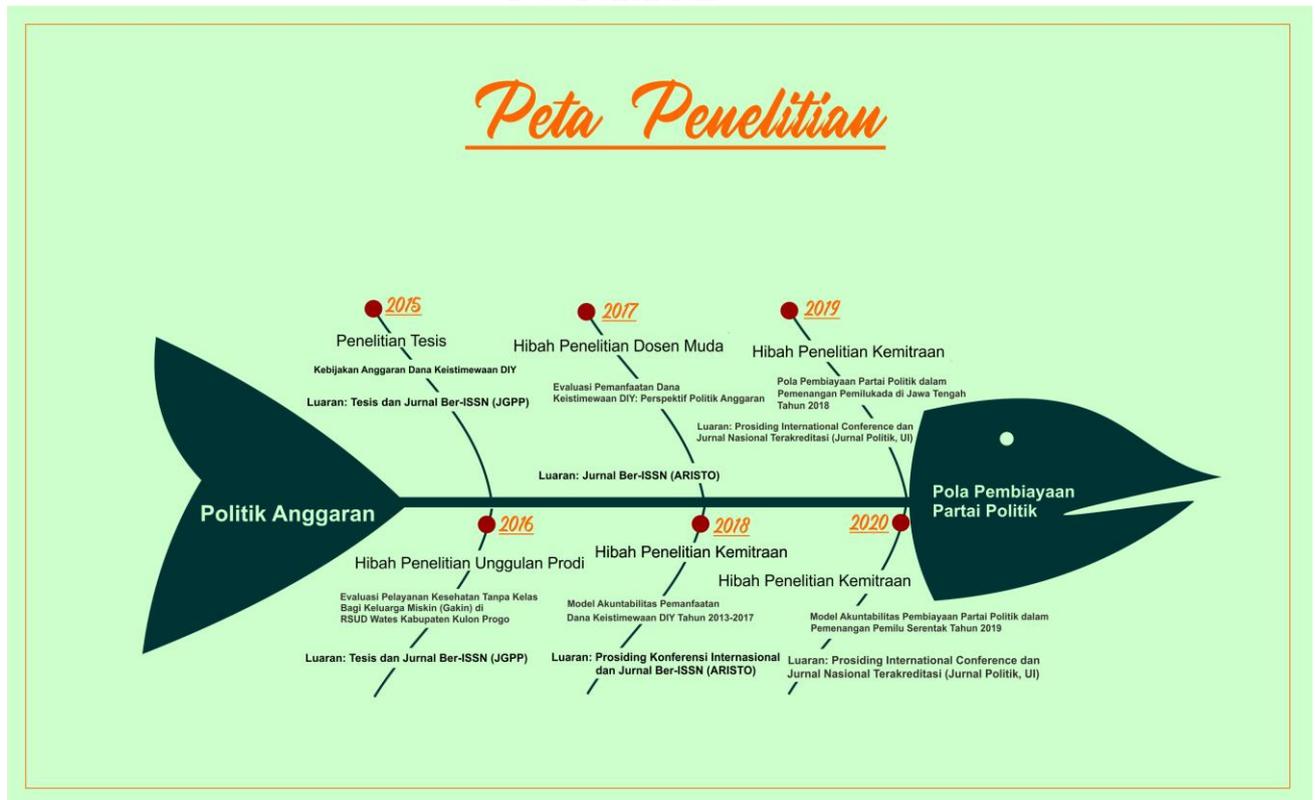
Seseorang yang melakukan pembiayaan politik dinamakan sebagai patron. Seorang patron memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Kekuasaan dalam pembiayaan politik bisa digambarkan dengan kekayaan atau kemampuan finansial seorang patron yang mampu melaksanakan pembiayaan politik. Pembiayaan melalui Patron merupakan metode yang biasanya dipakai oleh partai politik, ini dikarenakan patron sendiri juga berafiliasi sebagai kader dalam sebuah partai politik, atau mudahnya Patron merupakan seorang kader partai politik yang memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih tinggi dari kader lainnya dalam sebuah partai politik.

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI membahas mengenai aturan tentang partai politik dan sumbangan dari APBN yang juga mengalami kenaikan signifikan yang awalnya Rp 120 per suara menjadi Rp 1000 per suara. Kenaikan ini, menurut KPK, untuk mengurangi praktik korupsi oleh para politisi pada partai politik. Ada juga aturan tentang sumbangan dari lembaga atau pribadi kepada calon peserta Pemilu, aturan tersebut bertujuan untuk membatasi biaya politik yang begitu besar.

Dalam penelitian ini pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilukada di Jawa Tengah tahun 2018. Selain itu, pembiayaan dilakukan untuk segala aktivitas kepartaian

baik berupa kaderisasi, pendidikan politik dan agenda politik yang lainnya. Pembiayaan partai politik merupakan dana yang dikumpulkan oleh partai politik dengan sumber dana pendapatan partai memiliki model atau pola yang berbeda-beda tergantung manajemen internal suatu partai politik.

Gambar 1.1
Peta Penelitian



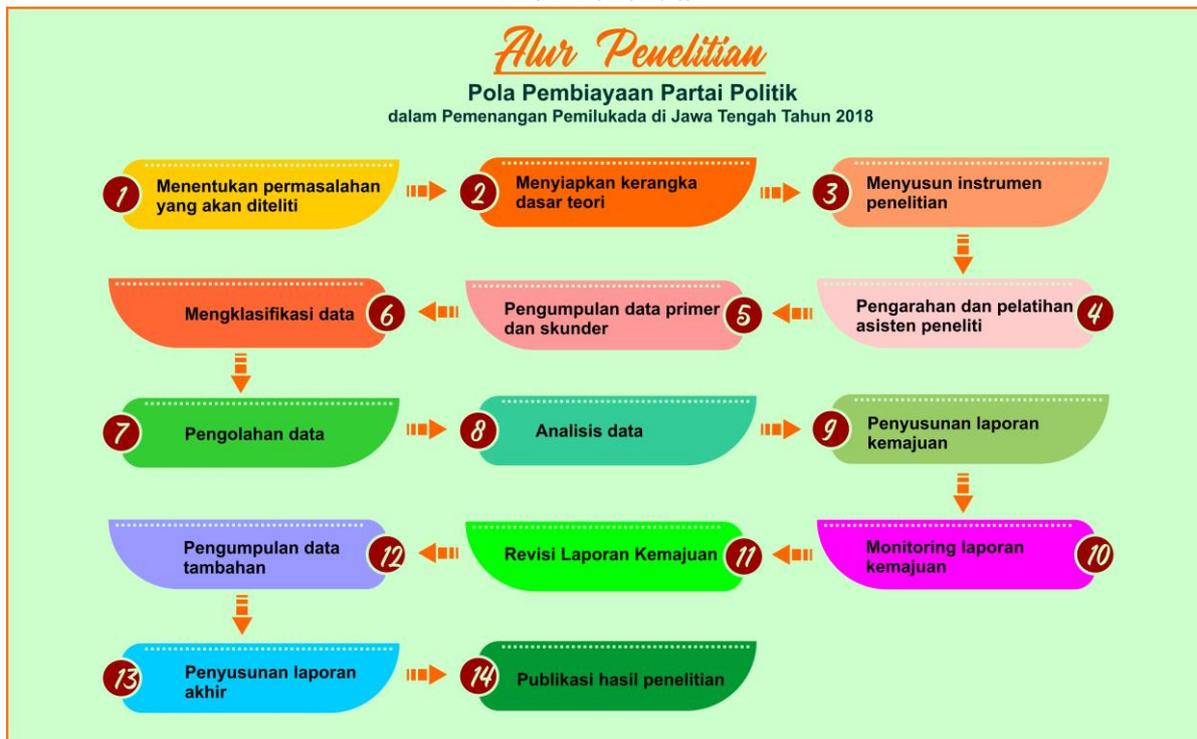
1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian berupa sumber-sumber pembiayaan partai politik, bentuk-bentuk pembiayaan, pola penggunaan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan serta akuntabilitas pembiayaan partai dalam pemenangan Pemilukada di Jawa Tengah Tahun 2018. Data primer ini akan dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Jawa Tengah, dan Ketua Tim Pemenangan Wilayah Karisidenan (Solo, Semarang, Magelang, Pekalongan, Banyumas, Pati). Wawancara akan dilaksanakan dalam periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

Sementara itu, data sekunder berupa data statistik jumlah pemilih, jumlah TPS, data keuangan partai yang akan dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi berupa Jurnal

ilmiah, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ganjar Pranowo, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PDI Perjuangan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PDI Perjuangan, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PDI Perjuangan, dan Hasil *Legislative Summit* 2018. Selanjutnya, alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Alur Penelitian



Uraian kegiatan penelitian:

- 1) Menentukan permasalahan yang akan diteliti. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Referensi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY sejak bulan November 2018 dengan tujuan untuk melengkapi data empirik yang berkaitan dengan pembiayaan partai politik, teori-teori, definisi konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan partai politik dalam Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode studi literatur untuk mengkaji dan memetakan studi-studi yang berkaitan dengan pembiayaan partai politik tersebut.
- 2) Menyiapkan kerangka dasar teori. Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY dengan metode studi literatur dan analisis bahan-bahan

online yang berkaitan dengan pembiayaan Pemilukada oleh partai politik. Kegiatan ini dimulai sejak November 2018.

- 3) Menyusun instrumen penelitian. Sama dengan kegiatan di atas, kegiatan ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Kegiatan ini dilakukan dengan metode studi literatur dan analisis bahan-bahan online terkait pengalaman partai politik dalam membiayai Pemilukada. Kegiatan ini dimulai bulan Desember 2018 dan Januari 2019.
- 4) Pengarahan dan pelatihan asisten peneliti. Kegiatan ini melibatkan para asisten peneliti lapangan yang terdiri dari Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (S1) Fisipol UMY. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah untuk menjelaskan dan diskusi tentang instrumen penelitian yang akan digunakan untuk menggali data di lapangan. Kegiatan ini dimulai pada bulan Februari 2019.
- 5) Pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber sehingga dalam proses ini membutuhkan bahan-bahan berupa tape recorder dan HP untuk merekam sumber data yang diwawancarai. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Terpilih Ganjar Pranowo, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Jawa Tengah, dan Ketua Tim Pemenangan Wilayah eks-Karesidenan (Surakarta, Semarang, Kedu, Pekalongan, Banyumas, Pati). Kegiatan ini melibatkan peneliti utama dan anggota peneliti serta para asisten peneliti. Sementara itu, pengumpulan data sekunder melalui studi literature terhadap Jurnal ilmiah, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ganjar Pranowo, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PDI Perjuangan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PDI Perjuangan, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PDI Perjuangan, dan Hasil *Legislative Summit* 2018. Kegiatan ini dilakukan dengan metode mengakses internet untuk menelusuri bahan-bahan peraturan perundang-undangan dan metode dokumentasi di kantor Pemerintah tersebut untuk menelusuri kebijakan-kebijakan yang telah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan lainnya. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 1 Juni 2016. Selanjutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
- 6) Mengklasifikasi data. Merupakan suatu bentuk data analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2019.

- 7) Pengolahan data. Kegiatan ini melibatkan peneliti utama dan para asisten peneliti lapangan untuk pengklasifikasian data hasil dokumentasi lapangan dan wawancara dengan sumber-sumber data ke dalam kategori-kategori yang dibangun sesuai dengan tema-tema dalam penelitian. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2019.
- 8) Analisis data. Kegiatan ini melibatkan peneliti utama dan para asisten peneliti lapangan untuk membandingkan antara yang normatif-teoritik dengan data empirik untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2019.
- 9) Penyusunan laporan kemajuan. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh peneliti utama dan dibantu oleh asisten peneliti untuk menuliskan secara sistematis hasil analisis data sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2019.
- 10) Monitoring laporan kemajuan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh peneliti utama. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi terhadap laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2019.
- 11) Revisi laporan kemajuan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh peneliti utama. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penilaian terhadap laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada awal bulan September 2019.
- 12) Pengumpulan data tambahan. Kegiatan ini akan melibatkan peneliti utama dan peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa data kepustakaan dan atau data lapangan jika diperlukan untuk melengkapi data yang telah ada. Kegiatan ini akan dilaksanakan akhir bulan September 2019.
- 13) Penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini akan melibatkan peneliti utama dan peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang telah disusun serta data kepustakaan dan atau data lapangan tambahan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.
- 14) Publikasi Hasil Penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target luaran dari penelitian ini. Direncanakan hasil penelitian bisa dilakukan pada bulan November-Desember 2019.

Sementara itu, Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

Nama Lengkap	Status Keanggotaan	Uraian Tugas
Sakir, S.IP., M.IP	Ketua Peneliti	Membuat instrumen penelitian, wawancara dan analisis data serta membuat naskah publikasi
Anwar Kholid, S.IP., M.IP	Anggota Peneliti	Melakukan wawancara dan analisis data serta membuat naskah publikasi
Anugrah Esa Oktoricho Al-Amin	Asisten Peneliti 1	Pengumpulan data primer dan sekunder serta membuat skripsi
Muhammad Taufiq Fatchurrahman Bengkulah	Asisten Peneliti 2	Pengumpulan data primer dan sekunder serta membuat skripsi

1.4. Biaya dan Jadwal Penelitian

1.4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Honor	3.000.000
2	Peralatan Penunjang	1.074.000
3	Bahan Habis Pakai	7.575.500
4	Perjalanan dan Pertemuan	3.350.500
Jumlah		15.000.000

1.5. Daftar Pustaka

- Ali. Mahfud, (2003). *“Money politics dalam Pilkada”*, Jurnal Hukum, Volume XII, No. 2, Hlm. 227-234
- Amrullah M. Arief. (2004). Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dan. *Jurnal Hukum*, vol.11, 119–130.
- Dwipayana, AAGN Ari. (2013). *Pembiayaan Gotong Royong : Studi Tentang Dinamika Pembiayaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada periode 1993 – 1999 (Ringkasan Desertasi)*. Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM : Yogyakarta.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada
- Faisal, Bariroh, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Integritas*, 4(1), 265–287.
- Fitriyah. (2011). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Jurnal Ilmu Politik*, 1–10.
- Fuad, A. B. B. (2014). Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village – Malang, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 477–485. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.060>
- Radar Semarang, Realitas Biaya Politik. (2018). (<http://radarsemarang.com/2018/05/29/bayar-saksi-di-tps-butuh-rp-15-m/>) diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 19:14).
- Schroder, P. (2000). *Politische Strategien. First Edition. Nomos. Baden-Baden*. Terjemahan FNF. 2013. Strategi Politik. Edisi Pertama.
- Syawawi, Reza. Kutukan Dana Politik. *Kompas*, 26 November 2018.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang *Partai Politik*.

LAMPIRAN 2: Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian

1. Honorarium				
Pelaksana	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor dalam setahun (Rp)
Ketua	20.000	5	10	1.000.000
Anggota 1	18.000	5	10	900.000
Asisten Peneliti 1	13.750	4	10	550.000
Asisten Peneliti 2	13.750	4	10	550.000
Sub total				3.000.000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Setahun (Rp)
Kertas HVS (rim)	Print dokumen	10	40.000	400.000
Tinta	Print dokumen	6	200.000	1.200.000
Alat tulis (pensil, bolpen, klip, map dll)	Tulis menulis	1	150.000	150.000
Fotocopy data dokumen	Pengumpulan data	5000	100	500.000
Fotocopy bahan literature	Kajian literatur	2000	100	200.000
Fotocopy proposal	Perijinan	500	100	50.000
Fotocopy hasil penelitian	Laporan penelitian	3000	100	300.000
Jilid proposal	Perijinan	10	25.000	250.000
Jilid hasil penelitian	Laporan penelitian	10	40.000	400.000
Biaya telepon	Komunikasi pengumpulan data	2	50.000	100.000
Biaya pulsa internet (6 bulan)	Browsing data dan literatur	2	250.000	500.000
Baterai	Alat wawancara	5	10.000	50.000
Biaya pengolahan data	Pengolahan data	1	500.000	500.000
Biaya analisis data	Analisis data	1	500.000	500.000
Konsumsi selama penelitian (4 orang x 5 hari)	Konsumsi	20	50.000	1.000.000
Biaya FGD	Pengumpulan Data	1	2.575.500	2.575.500
Sub total				7.575.500
3. Biaya Perjalanan dan Pertemuan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya Tahunan
Perjalanan ke Solo, Semarang, Magelang, Pekalongan, Banyumas, dan Pati	Wawancara dan dokumentasi	5x3	150.000	2.250.000
Rapat Koordinasi Tim Peneliti	Fiksasi Proposal, instrumen penelitian, dan Analisis data	5	220.100	1.100.500
Sub total				3.350.500
4. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)
Sewa Kamera	Dokumentasi Penelitian	1	1.074.000	1.074.000
Sub total				1.074.000
Total Dana yang diperlukan				15.000.000

LAMPIRAN 2: BIODATA PENGUSUL

A. Ketua Pengusul

Nama	Sakir, S.IP., M.IP
NIDN/NIK	0506118902
Pangkat/Jabatan	Penata Muda Tingkat I/Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan
E-mail	mas.sakir@fisipol.umy.ac.id
ID Sinta	5974452
h-Index	1

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Penulis Pertama	Journal of Governance and Public Policy, Vol 2, No. 3, October 2015 ISSN:2355-8695 Online: 2549-7669	http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2129
2	Peningkatan Daya Saing TK ABA Berbasis Penguatan Organisasi dan Teknologi Informasi Melalui Program Sister School	Penulis Kedua	BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, Vol 5, No 2 (2017): August; ISSN: 2252-8172 (print)	http://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/view/4500
3	An Evaluation Of Classless Health Services for Poor Families (Gakin) In Wates, Kulon Progo Regency	Penulis Pertama	Journal of Governance and Public Policy; Vol 5, No 2 (2018): June 2018 ISSN:2355-8695 Online: 2549-7669	http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/4581

Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul	Penulis Pertama	Seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Ponorogo	http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2269/Seminar%20Pilkada%20serentak.pdf?sequence=1
2	Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Adat Terasing. Studi Kasus: Pada Suku Tengger Desa Ranu Pane	Penulis Pertama	Seminar Nasional di Universitas Asiyah Yogyakarta	https://www.researchgate.net/publication/325544513_Kualitas_Pelayanan_Kesehatan_pada_Masyarakat_Adat_Terasing_Studi_Kasus_Pada_Suku_Tengger_Desa_Ranu_Pane
3	Institutionalization of Good Governance Strategy in the Process of Legislative Elections	Penulis Keempat	Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 84, International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)	http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13780/ICONEG%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4	Ease Of Licensing Policy For Micro and Small Enterprises In Bantul Regency To Confront Asean Economic Community	Penulis Keempat		http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13782/FULL%20PAPER%20APPPN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5	Implementation of Regional Regulations Number 5 2016 In Bantul	Penulis Ketiga	ICONPO 2018, IPDN	http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13779/ICONPO%20VII.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3	Accountability of Village Fund Management in Infrastructure Development at Tegalrejo Village, Gendangsari District, Gunungkidul Regency in 2016	Penulis Kedua	JGP International Conference, ISBN: 978-602-73900-4-1 (30 Oktober 2018)	https://drive.google.com/file/d/1X6wkpGPeRToiDLAoYimeJk07SPP5Q65V/view

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori	2014		Pustaka Pelajar	

Yogyakarta, 09 Desember 2018
Yang Menyatakan,



Sakir, S.IP., M.IP

B. Anggota Peneliti

Nama	Anwar Kholid, S.IP., M.IP
NIDN/NIK	0505028604
Pangkat/Jabatan	Penata Muda Tingkat I/Dosen Ilmu Pemerintahan
E-mail	anwar.kholid@fisipol.umy.ac.id
ID Sinta	
h-Index	

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Roengtam, Sataporn; Nurmandi, Achmad; Almarez, David; Kholid, Anwar. (2017). "Does Social Media Transform City Government? A Case Study of Three ASEAN Cities: Bandung, Indonesia, Iligan, Philippines and Phuket, Thailand". <i>Transforming Government: People, Process and Policy</i> ,	Penulis Ketiga	Vol. 11 Issue: 3, pp.343-376.	https://doi.org/10.1108/TG-10-2016-0071
2	Kholid, Anwar; Swarga, Alim B. (2016). Social Media: The Creation of Online "Public Sphere" in Indonesia.	Penulis Pertama	Presented at the International Conference of Public Organization (ICONPO) VI on August 10-11, 2016 in Thammasat University, Bangkok, Thailand.	
3	Kholid, Anwar; Widyasari, Wulan. (2016). Rethinking Bhineka Tunggal Ika: Perspectives for a Culture of Diversity in Indonesia.	Penulis Pertama	In C. Behrens (Ed.), Diversity Concepts - Diversity Politics, pp. 143-156. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.	
4	Widyasari, Wulan; Kholid, Anwar. (2016). Rethinking Bhineka Tunggal Ika: LGBT Issues as New Social Phenomenon in Indonesia.	Penulis Kedua	Presented at the International Conference on Social Politics 2016 on January 26-28, 2016 in Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia	

5	Kholid, Anwar; Husein, Rahmawati; Mutiarin, Dyah; Rahmawati, Listiya. (2015). The Influence of Social Media towards Student Political Participation during the 2014 Indonesian Presidential Election.	Penulis Pertama	Journal of Government and Politics Vol. 6 Issue: 2 pp 246-264.	
6	Behrens, Christoph; Kholid, Anwar, and Paramitha, Pradnya. (2013). Governance Reform in Indonesia: Progress and Obstacles on Meso and Micro Level.	Penulis Kedua	In C. Behrens (Ed) Complexity Governance: Change Management under Challenges of Glocalization, pp.29-51. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.	

Yogyakarta, 09 Desember 2018
Yang Menyatakan,

Anwar Kholid, S.IP., M.IP

LAMPIRAN 3: SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
TERAKREDITASI "A" No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sakir, S.IP., M.IP
NIDN : 0506118902
Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat I/III b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

***Pola Pembiayaan Partai Politik Dalam Pemenangan Pemilu
di Jawa Tengah Tahun 2018***

Yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Kemitraan untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima tim pengusul.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK. 19660838199403163025



Sakir, S.IP., M.IP
NIK. 19891106201604163156